

**IDENTIFIKASI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMBANGUNAN JALAN DAN SALURAN LINGKUNGAN
PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA SEMARANG**

TUGAS AKHIR

Oleh :

Toni Mardiantono.

L2D 300 381



**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2003

ABSTRAK

Perkembangan suatu kawasan akan mempunyai dampak yang meluas ke berbagai sisi kehidupan, salah satunya adalah meningkatnya jumlah penduduk baik dari faktor alami maupun faktor migrasi membawa kosekuensi terhadap peningkatan kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana penunjang kawasan tersebut. Prasarana jalan dan saluran drainase merupakan sebagian dari aspek fisik lingkungan yang menentukan kualitas permukiman. Dengan keterbatasan sumber daya masyarakat serta minimnya pendapatan masyarakat, tentunya sulit bagi masyarakat di lingkungan tersebut untuk dapat memenuhi sendiri bagi pengadaan/ penyediaan prasarana lingkungan (jalan dan saluran) yang memadai. Pembangunan jalan dan saluran lingkungan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada permukiman kumuh di Kota Semarang telah mengikutkan masyarakat dalam pelaksanaannya. Keterlibatan masyarakat di lokasi kegiatan dilakukan mulai dari tahap penyiapan masyarakat, perencanaan, pelaksanaan hingga pemeliharaan.

Tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui seberapa besar partisipasi masyarakat dalam pembangunan jalan dan saluran lingkungan di permukiman kumuh Kelurahan Tanjung Mas, Mlatiharjo, Tambakrejo dan Mangunharjo Kota Semarang serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat partisipasi tersebut. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka sasaran penelitian yang dilakukan adalah identifikasi karakteristik masyarakat, bentuk partisipasi masyarakat, tingkat partisipasi masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terhadap kegiatan pembangunan jalan dan saluran lingkungan. Manfaat dari penelitian ini yaitu dapat memotivasi masyarakat agar dapat lebih meningkatkan partisipasinya dalam pembangunan prasarana lingkungan melalui penilaian secara berkala terhadap tingkat partisipasinya, serta sebagai masukan (evaluasi) bagi pelaksanaan program yang dilakukan oleh pemerintah dan bagi disiplin ilmu perencanaan wilayah dan kota dalam pengembangan metode pendekatan yang berkaitan dengan upaya peningkatan partisipasi masyarakat.

Pengumpulan data sehubungan dengan penelitian ini dilakukan melalui survei data primer maupun sekunder. Kemudian melakukan kajian teori dan analisis terhadap data-data hasil identifikasi tersebut, serta memberikan nilai skala/pembobotan dan scoring dari frekuensi tingkat partisipasi pada setiap tahapan pembangunan jalan dan saluran lingkungan. Pengolahan data untuk menemukan tingkat partisipasi menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dengan alat analisis tabulasi silang. Pengklasifikasian tingkat partisipasi digolongkan pada tingkatan partisipasi rendah, sedang, dan tinggi. Sedangkan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif berdasarkan uji keterkaitan antara karakteristik masyarakat dengan bentuk partisipasi.

Hasil studi ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan jalan dan saluran lingkungan di empat lokasi permukiman kumuh Kota Semarang berada pada tingkat partisipasi sedang, atau pada skala Arnstein berada antara tingkat ke 5 yaitu “penentram” (placation) dan tingkat ke 6 yaitu “kemitraan” (partnership). Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi adalah faktor internal dan faktor eksternal, baik yang sifatnya mendorong maupun yang menghambat. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh kondisi karakteristik sosial ekonomi masyarakatnya seperti jenis pekerjaan dan tingkat penghasilan, sedangkan faktor eksternal lebih dipengaruhi oleh adanya bantuan teknis dari pemerintah melalui program peningkatan kualitas lingkungan permukiman seperti KIP Plus dan Tridaya. Rekomendasi dari studi ini adalah bahwa peranserta masyarakat dalam pembangunan prasarana lingkungan permukiman perlu dioptimalkan melalui strategi pemberdayaan masyarakat dengan melaksanakan pembinaan teknis dari pemerintah maupun tokoh masyarakat serta perlu studi lanjut untuk mengkaji lebih dalam tentang kegiatan partisipasi masyarakat di Kelurahan Mangunharjo yang mempunyai katagori tingkat partisipasi tinggi dibandingkan dengan tiga kelurahan lainnya.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Kota-kota di Indonesia pada umumnya berkembang tanpa dilandasi dengan perencanaan kota yang menyeluruh dan terpadu, sehingga perkembangan kota yang ditandai dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk yang cukup besar dalam waktu yang relatif pendek dapat menimbulkan berbagai masalah perkotaan, antara lain (Budihardjo, 1992 : 124)

- ◆ Menjamurnya permukiman kumuh (rumah liar) dengan sarana dan prasarana yang sangat tidak memadai untuk mendukung keberlangsungan kehidupan manusia yang berbudaya.
- ◆ Berkurangnya daya dukung lahan perkotaan yang dapat mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan.
- ◆ Permintaan akan lahan dari sektor yang lainpun bertambah, sehingga harga lahan melonjak tinggi dan kesempatan untuk mendapatkan lahan semakin sulit.
- ◆ Dapat menimbulkan tekanan terhadap kondisi fisik kota itu sendiri, dan akibatnya berdampak pada perilaku kehidupan penduduknya, meningkatnya pengangguran, kriminalitas, kemacetan lalu lintas, polusi udara, menurunnya tingkat pelayanan kota.

Pemerintah selaku pengelola kota bertanggungjawab terhadap penyediaan pelayanan perkotaan yang merupakan kebutuhan dasar suatu kota, seperti : perumahan, air bersih, drainase, limbah domestik/ industri, persampahan, jalan, listrik, telepon, serta fasilitas sosial dan fasilitas umum lainnya. Namun di dalam memenuhi pelayanan kota tersebut terdapat beberapa kendala yang dialami oleh pemerintah, yaitu terbatasnya wewenang pemerintah daerah dan terbatasnya sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan sumber daya finansial/pembiayaan (Sumber : Soemitro, dalam Budihardjo, 1992 : 125).

Kekurangsiapan dalam mengantisipasi kecepatan dan dinamika pertumbuhan fisik dan fungsional kawasan perkotaan sejalan dengan berkembangnya pusat kegiatan ekonomi dapat menimbulkan permasalahan

di daerah perkotaan. Ketidakseimbangan pembangunan antara desa dan kota ditambah lagi krisis ekonomi yang berkepanjangan turut pula memacu arus urbanisasi yang pada akhirnya dapat menambah beban kota, yang berdampak pada penurunan kualitas dan kuantitas pelayanan kota. Prasarana lingkungan yang kurang memadai, baik kualitas maupun kuantitas pada suatu permukiman dapat berpengaruh terhadap kesehatan dan kesejahteraan penghuninya. Ini berarti bahwa keberadaan prasarana lingkungan adalah syarat bagi terciptanya kenyamanan hunian (Claire, dalam Hapsari, 2001 : 32).

Untuk menciptakan kehidupan yang nyaman bagi penduduk, angka pertumbuhan penduduk yang tinggi harus diantisipasi dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer kehidupan mereka, termasuk diantaranya adalah kebutuhan akan perumahan dan prasarana lingkungan yang layak. Seharusnya laju kuantitas pembangunan perumahan akan meningkat seiring dengan meningkatnya penduduk. Di samping itu laju kuantitas pembangunan perumahan juga harus diikuti oleh semakin meningkatnya kualitas fisik yang baik dan memenuhi persyaratan tempat hunian yang layak.

Penyediaan prasarana lingkungan yang memadai pada suatu permukiman tidak seterusnya dapat dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat dan swasta yang telah dianggap sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan diharapkan dapat lebih berperan, terutama dalam mengembangkan dan memelihara prasarana dan sarana yang telah dibangun. Namun pada kenyataannya tidak semua tempat dapat melaksanakan apa yang menjadi harapan tersebut, mengingat kondisi lingkungan serta kemampuan masyarakatnya yang tidak sama. Karakteristik masyarakat yang ada di kawasan padat yang pertumbuhannya cukup pesat dapat berbeda-beda, karena biasanya berasal dari daerah yang berlainan. Struktur sosial pada umumnya juga berbeda dikarenakan mata pencaharian mereka juga berbeda, ada yang sudah berhasil (mapan) dan ada pula yang masih serba kekurangan karena tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Strata masyarakat di permukiman seperti ini menjadi kendala bagi pengembangan/penataan kawasan tersebut, sehingga diperlukan upaya penanganan sesuai dengan kondisi setempat serta memperhatikan aspirasi masyarakat setempat

namun tetap dalam koridor teknis bagi suatu permukiman di daerah perkotaan.

Untuk menciptakan lingkungan yang berkualitas diperlukan penataan yang terarah dan dilaksanakan secara terpadu. Pelibatan masyarakat pada setiap tahapan pembangunan, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pemanfaatan dan pemeliharaan akan sangat membantu dalam mewujudkan tujuan dari pada pembangunan itu sendiri. Masyarakat akan menyadari bahwa pembangunan tersebut memang untuk mereka sendiri, sehingga mereka akan ikut merasa memiliki, dengan demikian pengelolaan/pengembangan prasarana lingkungan diharapkan dapat dilaksanakan melalui peranserta masyarakat yang lebih besar lagi.

Adanya kendala finansial yang dihadapi pemerintah daerah, mau tidak mau diharapkan adanya partisipasi dari masyarakat setempat baik yang secara langsung maupun tidak langsung menikmati hasil pembangunan tersebut.

Paradigma pembangunan yang secara perlahan-lahan telah bergeser pada upaya meningkatkan peranserta masyarakat dalam berbagai tahapan kegiatan pembangunan. Prinsip dari pelaksanaan program tersebut adalah menempatkan masyarakat selain sebagai obyek pembangunan adalah juga sebagai subyek atau pelaku pembangunan yang diharapkan dapat melanjutkan/mengembangkan program pembangunan tersebut serta dapat mengatasi masalahnya sendiri terutama dalam peningkatan kualitas lingkungan permukimannya.

Studi tentang permukiman kumuh di kota Semarang telah dilaksanakan, yang antara lain adalah Identifikasi dan indikasi Kawasan Kumuh di 6 (enam) Kota/Kabupaten di Jawa Tengah Tahun 2000 oleh PU Cipta Karya Propinsi Jawa Tengah. Didalam studi identifikasi kawasan kumuh tersebut terdapat beberapa aspek yang telah dikaji, yaitu : aspek penguasaan dan pemilikan tanah, aspek tata ruang, aspek lingkungan, aspek prasarana lingkungan, aspek sarana lingkungan, aspek kepadatan dan pertumbuhan bangunan, aspek konstelasi terhadap kota, aspek ekonomi, aspek sosial kemasyarakatan, aspek program pemerintah, dan aspek partisipasi masyarakat. Berdasarkan kajian terhadap aspek-aspek tersebut didapat lokasi-lokasi / kawasan-kawasan kumuh, yaitu :